

LAPORAN KINERJA



TRIWULAN I



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2025 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2025 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Perikanan Budidaya. LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2025 ini mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyesuaikan dengan DJPB KKP berikut pencapaian IKU melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 oleh masing-masing kelompok kerja yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan perikanan budidaya di masa mendatang.

Lombok Barat, 17 April 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	7
BAB 1. PENDAHULUAN.....	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Maksud dan Tujuan	10
1.3. Tugas dan Fungsi	10
1.4. Isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>) dan Permasalahan Utama.....	13
1.5. Sistematika LKj.....	14
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Sasaran Kegiatan	16
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN	17
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	18
2.4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025	20
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
a. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	57
b. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	57
BAB 4. PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025	21
Tabel 2. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan	25
Tabel 3. . Perbandingan realisasi Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	25
Tabel 4. Prosentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat.....	27
Tabel 5. Bantuan benih ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat.....	27
Tabel 6. Perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut	28
Tabel 7. Prosentase Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT BPBL Lombok ..	30
Tabel 8. Perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut	30
Tabel 9. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut.....	31
Tabel 10. Perbandingan antar UPT Laut	32
Tabel 11. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	33
Tabel 12. Prosentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan	34
Tabel 13. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji	34
Tabel 14. Persentase pengujian AMR	36
Tabel 15. Perbandingan Persentase pengujian sampel AMR	37
Tabel 16. Persentase bantuan sarana KBRL yang disalurkan ke masyarakat	38
Tabel 17. Perbandingan antar UPT Laut DJPB	38
Tabel 18. Persentase bantuan bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat.....	41
Tabel 19. Perbandingan antar UPT Laut DJPB	42
Tabel 20. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	49
Tabel 21. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2025	12
Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Maret 2025	12
Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Maret 2025.....	13
Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2025	13
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Gambar 6 Screenshot aplikasi Kinerjaku.....	20
Gambar 7. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat.....	27
Gambar 8. Calon Induk yang diproduksi di BPBL Lombok.....	29
Gambar 9. Kegiatan Sampling untuk pengujian di Laboratorium Keskanling	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10. Screenshot aplikasi OMSPAN	57
Gambar 11. Screenshot aplikasi SMART DJA	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memuat rencana, capaian dan realisasi anggaran dan kegiatan BPBL Lombok pada Triwulan I Tahun 2025. Berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025, maka telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh satker BPBL Lombok terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap Sasaran Strategis sebagaimana berikut :

Sasaran Kegiatan 1, yaitu : “Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar” didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu : (i) Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok

Sasaran Kegiatan 2, yaitu : “Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut” didukung oleh 5 (lima) IKU, yaitu : (i) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ii) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok (iii) Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok (iv) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (v) Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok

Sasaran Kegiatan 3, yaitu : “Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut” didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu: (i) Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok; (ii) Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok.

Sasaran Kegiatan 4, yaitu : “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok” didukung oleh 12 (dua belas) IKU yaitu (i) Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok; (ii) Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok; (iii) Nilai

minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok; (iv) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok; (v) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok; (vi) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok; (vii) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok; (viii) Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok; (ix) Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok; (x) Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok; (xi) Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok; (xii) Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan I Tahun 2025, yaitu:

1. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok Sampel
2. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok

Sementara terdapat 18 (Delapan belas) indikator yang belum bisa dihitung pada Triwulan I Tahun 2025, yaitu :

1. Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok
3. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok
4. Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok
5. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
6. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
7. Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
8. Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok
9. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi
10. Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

11. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya
14. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok
15. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
16. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok
17. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
18. Persentase Penyelesaian SOP Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025, dapat diketahui bahwa BPBL Lombok telah mencapai target yang ditentukan pada Triwulan I, meskipun demikian BPBL Lombok akan tetap meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan target-target yang ditentukan pada periode mendatang untuk dapat mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan penyusunan target kinerja Tahun 2025, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dan kemudian dituangkan dalam LKj Triwulan I Tahun 2025. LKj BPBL Lombok ini menginformasikan *input, output, outcome, dan benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2025 yaitu : (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBL Lombok kepada seluruh *stakeholders*; (ii) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2025; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Tugas dan Fungsi

BPBL Lombok bertugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budi daya laut,

sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi BPBL Lombok terdiri dari :

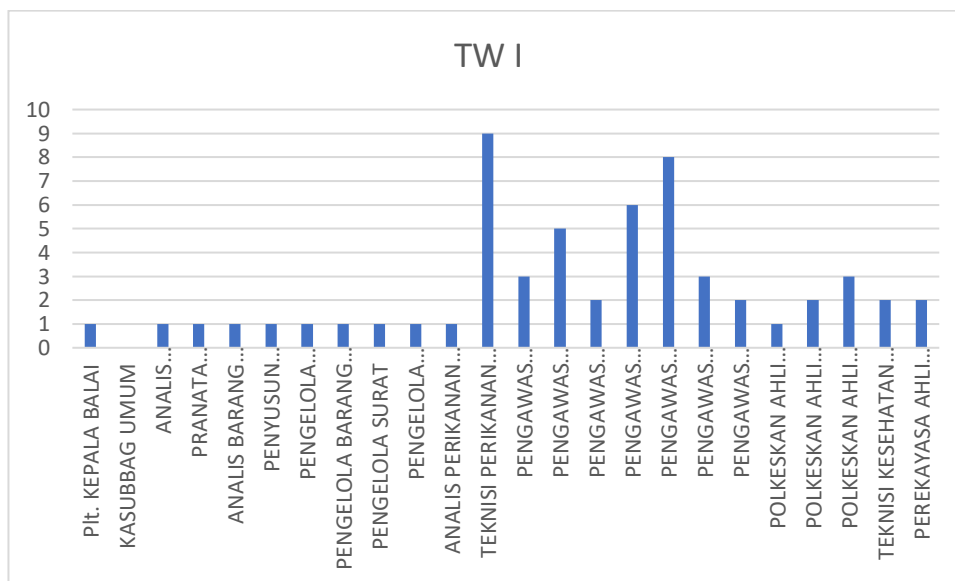
1. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi BPBL Lombok tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :

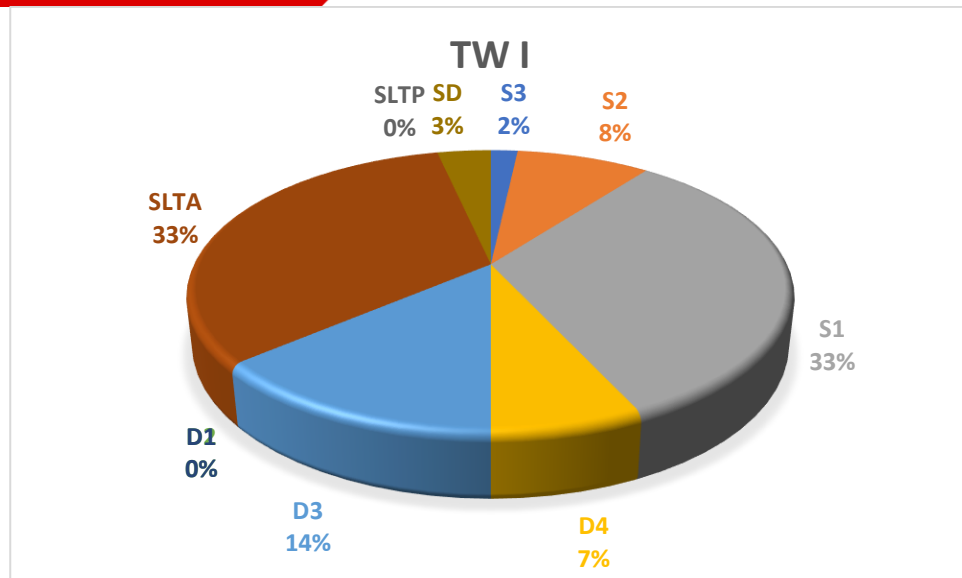


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2025

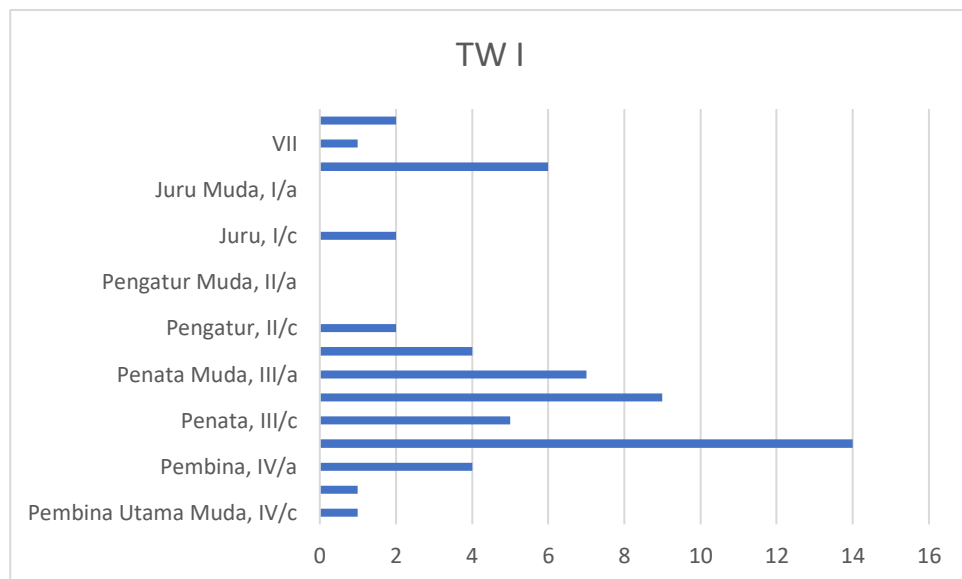
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok didukung oleh SDM sejumlah 58 orang dengan rincian sejumlah 50 orang ASN dan 8 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Maret 2025



Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Maret 2025



Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2025

1.4. Isu Strategis (*Strategic Issued*) dan Permasalahan Utama

1.4.1. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut

Budidaya laut (Marine Culture) di Indonesia merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai kontribusi penting dalam memenuhi target produksi perikanan. Potensi sumber daya perikanan budidaya laut khususnya di Propinsi NTB dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: rumput laut, mutiara, lobster, kerapu, kakap dan bawal bintang (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB). Lebih lanjut lagi data statistik perikanan budidaya di

Propinsi NTB diketahui pada tahun 2021, potensi areal budidaya laut seluas 171.010,51 hektar dengan jumlah Rumah Tangga Produksi berjumlah 10.033 unit.

Dalam pengembangan budidaya laut di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bali, NTT, dan Papua) khususnya di propinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPBL Lombok terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) harga pakan untuk komoditas ikan laut sangatlah tinggi (pakan segar dan pakan buatan); (ii) penyakit; (iii) akses permodalan yang terbatas karna ketidak stabilan produksi dan resiko kegagalan yang tinggi; (iv) standar kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan; (v) tingkat kelulushidupan (SR) biota yang dipelihara saat panen yang masih rendah karena berbagai macam faktor mulai dari lingkungan budidaya, tidak konsistennya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) hingga kualitas benih yang masih rendah dari segi pertumbuhan.

Selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi BPBL Lombok dalam pengembangan budidaya ikan air laut, diantaranya: (i) pengembangan teknologi budidaya dari jenis kekerangan, ikan bersirip dan juga lobster yang bernilai ekonomis tinggi belum optimal dilakukan; (ii) keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan SDM; dan (iii) wilayah kerja yang sangat luas.

1.4.2. Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di BPBL Lombok

Secara umum, permasalahan-permasalahan/ kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, diantaranya :

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan;
2. Belum adanya pegawai dengan jabatan arsiparis di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;

1.5. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Perikanan Budiaya Laut Triwulan I Tahun 2025 . LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Triwulan I Tahun 2025 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2025 , permasalahan yang dihadapi, dan upaya mengatasi hal tersebut.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBL Lombok serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBL Lombok, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan tapja yang memuat sasaran kegiatan berikut indikator kinerja utama (IKU) pada Triwulan I Tahun 2025.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBL Lombok serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya laut akan dicapai melalui sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Triwulan I Tahun 2024 .

Sasaran Kegiatan pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
 - b. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok
 - c. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok
 - d. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok
 - e. Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok
3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok;
 - b. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok.
4. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok;
 - c. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok;
 - d. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok;

- e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok;
- f. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok;
- g. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok;
- h. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok;
- i. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok;
- j. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok;
- k. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok;
- l. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok.

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan I Tahun 2025 difokuskan pada program pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pengelolaan budidaya rumput laut
2. Pengelolaan budi daya ikan air laut
3. Pengelolaan budi daya ikan air tawar
4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dimana dalam mencapai hal tersebut, telah didistribusikan melalui Klasifikasi Rincian Output yaitu : (i) Bantuan tumbuhan; (ii) Bantuan peralatan/sarana; (iii) Bantuan hewan; (iv) Sosialisasi dan Diseminasi; (v) Penyidikan dan Pengujian penyakit; (vi) Bantuan hewan; (vii) Penyidikan dan Pengujian penyakit; (viii) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (ix) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (x) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; (xi) Layanan dukungan manajemen internal; (xii) layanan manajemen SDM internal; (xiii) layanan manajemen kinerja internal.

Dalam mendukung rencana kerja tersebut, BPBL Lombok mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 sebesar **Rp. 18.397.276.000- (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)**. Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

1. Pengelolaan budidaya rumput laut (Rp. 1.929.030.000)

2. Pengelolaan budi daya ikan air laut (Rp. 2.332.340.000)
3. Pengelolaan budi daya ikan air tawar (Rp. 2.580.000.000)
4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Rp. 11.555.906.000)

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen anantara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, penetapan kinerja BPBL Lombok tahun 2025. Berikut adalah perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 1 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1 Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (unit)	12
SK 2 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ekor)	269.531
	3 Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok (ekor)	948
	4 Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok (Orang)	300
	5 Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374
	6 Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16
SK 3 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7 Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (Unit)	26
	8 Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	7129
SK 4 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	9 Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	85
	10 Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	81
	11 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76
	12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100
	13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	
	14 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92
	15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71,5
	16 Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3
	17 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	≥80
	18 Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok	80
	19 Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70
	20 Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok (persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

Data Anggaran

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	1.929.030.000
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	2.332.340.000
3	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.580.000.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.555.906.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025		18.397.276.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU)+IKM Pada Triwulan I Tahun 2025 ini adalah sebesar 114.63 % atau masuk dalam kategori ISTIMEWA (Biru). Berikut adalah hasil hasil *Screenshot* dari aplikasi Kinerjaku BPBL Lombok.



The screenshot displays the 'Daftar Capaian Unit Kerja' (Unit Work Achievement List) interface. At the top, there are filters for 'Tahun' (Year) set to 2025, and three 'Level' dropdowns (Level-1, Level-2, Level-3) all set to 'Belum di pilih...'. A 'Download' button and a 'Tutup' (Close) button are on the right. Below the filters is a table with four columns: TW-1, TW-2, TW-3, and TW-4. The TW-1 column shows a value of 114.63% in a blue bar, indicating a high achievement. The TW-2, TW-3, and TW-4 columns are currently empty. The table is for the unit '0413060000 - BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LOMBOK'.

Gambar 6 Screenshot aplikasi Kinerjaku

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, berdasarkan sistem aplikasi Kinerjaku, diperoleh Nilai sebesar 114.63%. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi s/d TW I	Realisasi Terhadap Target TW I (%)	Realisasi terhadap Target 2025 (%)
			TW I			
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok	12	0	0	0	0
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok	269.531	41,000	51,000	124,39	18,92
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok	948	0	0	0	0
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok (Orang)	300	0	0	0	0
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374	96	775	807.29	207.22
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16	0	0	0	0

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2025



Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (Unit)	26	0	0	0	0.00
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	7129	0	0	0	0
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	84	0	0	0	0.00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	87	0	0	0	191.61
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76	0	0	0	0.00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100	0	0	0	57.14
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	85	0	0	0	99,36

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2025



Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92	0	0	0	0.00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71,5	0	0	0	0.00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3	0	0	0	0.00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	≥80	0	0	0	90
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok	80	0	0	0	101.27
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70	0	0	0	0.00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok (persen)	65	0	0	0	0.00

ANALISIS CAPAIAN KINERJA**Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 :****Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar****1. Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
Satker BPBL Lombok**

Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan merupakan sarana dan prasarana bioflok dimana berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 301 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budi Daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok Tahun Anggaran 2025, BPBL Lombok sebagai Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab menyalurkan bantuan bioflok sebanyak 54 paket dengan kriteria sebagai berikut :

- a. benih ikan ;
- b. pakan ikan *starter* 1;
- c. pakan ikan *starter* 2;
- d. Pakan ikan *Grower* dan *finisher*;
- e. obat ikan dan vitamin;
- f. prasarana dan sarana operasional;
- g. peralatan perikanan;

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Tidak ada permasalahan pada IKU ini pada triwulan sebelumnya di tahun 2024, namun demikian BPBL Lombok akan melaksanakan kegiatan distribusi sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat secara efektif.

1. Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Capaian IKU ini dihitung pada akhir tahun pada Triwulan ke- IV dan ditargetkan sebanyak 12 paket, namun kegiatan identifikasi dan verifikasi serta distribusi diupayakan dapat terealisasi pada triwulan sebelumnya serta dilakukan akselerasi dengan ketersediaan anggaran, sehingga tidak terkendala pada realisasi di triwulan ke-IV.

Tabel 2. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Tawar						
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target	Realisasi Terhadap
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2024	Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	2025	Target Tahunan (%)
0	0	0.00%	0.00	0	12	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Berikut adalah gambar realisasi Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok dibandingkan dengan Unit pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

Tabel 3. . Perbandingan realisasi Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	0	0	0.00
BPBL Ambon	0	0	0.00
BPBL Batam	0	0	0.00
BBPBL Lampung	0	0	0.00

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada indikator kinerja ini pada Tahun 2025 sebesar Rp. 2.580.000.000,- , namun terdapat pemblokiran terkait efisiensi anggaran sehingga akan dilakukan penyesuaian Kembali pada triwulan selanjutnya.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini **tidak ada permasalahan**, Meskipun demikian, BPBL Lombok ke depannya tetap akan meningkatkan kinerja untuk mempercepat realisasi terhadap indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 :

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

2. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2025, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan benih ikan kepada masyarakat. Spesifikasi benih yang diberikan yaitu :

- a. Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm
- b. Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm
- c. Abalone ukuran minimal 2 cm
- d. Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm
- e. Tiram mutiara ukuran minimal 1 cm

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada tahun 2024 performa induk bawal bintang mengalami penurunan, sementara permintaan akan benih melalui program bantuan benih maupun penjualan benih permintaannya tinggi, sehingga pada kelompok kerja produksi mengalami kesulitan dalam pembagian focus terhadap pemenuhan target keduanya, dan hal ini berdampak hingga ke Triwulan ke-IV. Upaya tindak lanjut dari permasalahan ini adalah melakukan pengkayaan nutrisi pada induk bawal bintang untuk menjaga produktivitas induk bawal bintang kembali prima.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Realisasi Bantuan Benih Ikan Air Laut pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 51.000 ekor atau 124.39 % dari target 41.000 ekor ke wilayah Lombok Barat, Dompu dan Sumbawa. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian di Triwulan I sebesar 120,00%. Berikut adalah tabel capaian dan dokumentasi bantuan benih ikan :

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2025



Tabel 4. Prosentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 thd Triwulan I Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap target Tahunan 2024
Target	Realisasi	Capaian				
41,000	51,000.00	124.39%	120.00%	3.66%	269,531	18,9%

Tabel 5. Bantuan benih ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat

No	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST
Jumlah Total							41,000	
1	Abdul Rauf	Muara Biru	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	17 Januari 2025	Kakap Putih	11,000	B.137/BPBL-L/PB.140/I/2025
2	Ahmad	Mutiara Teluk Saleh	Nusa Tenggara Barat	Dompu	24 Februari 2025	Tiram Mutiara	20,000	B.392/BPBL-L/PB.140/II/2025
3	Esmandoro	Lumba-Lumba	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	24 Februari 2025	Tiram Mutiara	10,000	B.393/BPBL-L/PB.140/II/2025
4	Karimuddin	Suka Maju	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	24 Februari 2025	Tiram Mutiara	10,000	B.394/BPBL-L/PB.140/II/2025



27

Gambar 7. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan benih BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih tinggi daripada BPBL Ambon dan Batam dan BBPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut :

Tabel 6. Perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	41,000	51,000	124.39
BPBL Ambon	89,000	96,000	107.87
BPBL Batam	61,000	61,000	100.00
BBPBL Lampung	150,000	198,200	132.13

Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.617.186.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar Rp 411.484.790 atau 38.21% dari pagu untuk kegiatan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan yang berarti ataupun faktor penghambat dari capaian realisasi. Triwulan selanjutnya proses produksi benih dioptimalkan agar realisasi pada periode berikutnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok

Produksi calon induk unggul adalah kegiatan produksi calon induk unggul dari BPBL Lombok untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias, bawal bintang dan kakap putih.

Berikut adalah dokumentasi calon induk yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok :



Gambar 8. Calon Induk yang diproduksi di BPBL Lombok

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 terjadi permasalahan keterlambatan realisasi produksi calon induk bawal bintang dan kakap putih, dikarenakan keterlambatan penyediaan suplay pakan buatan, hal ini dikarenakan sumber anggaran belanja pakan buatan ini berasal dari pagu PNBP, namun demikian permasalahan ini dapat diatasi dengan pemenuhan target PNBP sehingga dapat dilakukan belanja kebutuhan dari anggaran yang bersumber dari PNBP.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini tidak terdapat realisasi produksi calon induk, hal ini dikarenakan faktor manajemennya yakni perencanaan produksi calon induk tidak ditargetkan untuk Triwulan I ini, sehingga prioritas program saat ini masih terfokus pada realisasi benatuan benih dan juga menyiapkan hasil produksi untuk kemudian dilakukan fase ke pembesaran hingga menjadi calon induk.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Produksi Calon Induk pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0%, namun demikian target dan realisasi calon induk di Tahun 2024 juga sebesar 0%. Berikut adalah Tabel persentase produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBL Lombok.

Tabel 7. Prosentase Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT BPBL Lombok

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 thd triwulan I Tahun 2024 (%)	Target 2025 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan
Target	Realisasi	Capaian				
0	0	0.00%	0.00	0.00%	948	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan benih BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah daripada BPBL Ambon dan Batam namun lebih tinggi daripada BBPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut :

Tabel 8. Perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	0	0	0.00
BPBL Ambon	30	50	166.67
BPBL Batam	0	2,040	120.00
BBPBL Lampung	0	0	0.00

Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 255.960.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum terealisasi sebesar 0% dari pagu untuk kegiatan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. .

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I ini tidak ada permasalahan, namun BPBL Lombok akan melakukan optimalisasi penggunaan anggaran untuk operasional belanja produksi agar target produksi calon induk dapat terlaksana.

4. Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu.

Pada Tahun 2025 ini BPBL Lombok ditargetkan melaksanakan diseminasi teknologi sebanyak 300 orang di wilayah kerja BPBL Lombok Bali, NTB dan NTT.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi karena kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Capaian IKU ini dihitung pada akhir tahun, diupayakan kegiatan diseminasi dilakukan sebelum akhir tahun sehingga dapat mencapai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan

Perbandingan dari waktu ke waktu

IKU Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya pada Triwulan I Tahun 2025 sama dengan Triwulan I Tahun 2024 dimana capaian baru akan dihitung pada akhir tahun.

Tabel 9. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan
Target	Realisasi	Capaian	Tahun 2024			
0	0	0.00%	0	0	300	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di BPBL Lombok sama dengan BPBL Lampung, BPBL Batam, dan BPBL Ambon, meski terdapat perbedaan target realisasi semua UPT Laut masih sama :

Tabel 10. Perbandingan antar UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	300	0	0.00
BPBL Ambon	400	0	0.00
BPBL Batam	300	0	0.00
BBPBL Lampung	300	0	0.00

Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.0000 dimana pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum ada realisasi.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I ini permasalahan yang terjadi adalah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 adanya efisiensi anggaran pada IKU ini, namun demikian BPBL Lombok tetap menyusun rencana kegiatan tersebut untuk dilaksanakan pada Triwulan IV.

5. Sampel Penyakit Ikan Air Laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok

Kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji adalah suatu kegiatan pelayanan pengujian sampel oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok yang terdiri dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi (non AMR), dan biologi molekuler.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga tidak ada perbaikan yang perlu dilakukan, hanya saja pada Triwulan ini dilakukan penyusunan target sampel pada Tahun 2025.

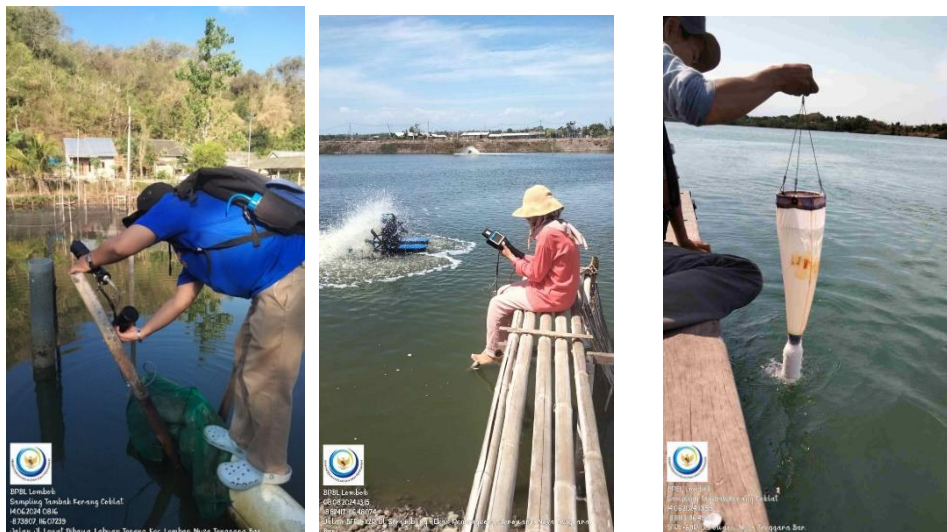
Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pada Triwulan I Tahun 2025 ini BPBL Lombok telah menguji sebanyak 775 sampel atau 120 % dari target sampel (374 sampel). Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 11. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No	Bulan	Target Bulanan	Ruang Lingkup				Jumlah	Kumulatif
			Kualitas Air	Patologi	Mikrobiologi	Biologi Molekuler		
1	Januari	32	285	8	1	17	311	311
2	Februari	32	220	0	35	37	292	603
3	Maret	32	98	18	14	42	172	775

Berikut ini dokumentasi kegiatan pengambilan sampel dan pengujian di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan :



Gambar 9. Kegiatan Sampling untuk pengujian di Laboratorium Keskanling

Perbandingan dari waktu ke waktu

Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan pada Triwulan I Tahun 2025 lebih tinggi 6,15 dari Triwulan I Tahun 2024. Berikut adalah Tabel Layanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan :

Tabel 12. Prosentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi Triwulan I	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Tahun 2024			
96	775.00	807.29%	112.95%	6,15	374	207.22%

Perbandingan antar sub unit kerja

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih tinggi dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 13. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	96	775	807.29
BPBL Ambon	73	275	376.71
BPBL Batam	290	531	183.10
BBPBL Lampung	135	432	320.00

Alokasi Anggaran

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 144.570.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar Rp 16.058925 atau 11,11% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan sampel kualitas air, sampel patologi, dan sampel mikrobiologi.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti yang dapat menghambat realisasi pengujian penyakit ikan air laut, sumberdaya yang ada akan dijaga performanya agar tetap stabil sehingga dapat tetap optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya.

6. Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang diuji satker BPBL Lombok

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.

Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.

Pengujian resistansi antimikroba oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba, dimana semakin kecil tingkat resistansi mikrobanya, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga tidak ada perbaikan yang perlu dilakukan, hanya saja pada Triwulan ini dilakukan penyusunan target sampel pada Tahun 2025.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini BPBL belum melakukan pengujian sampel AMR, pengujian AMR ditargetkan pada triwulan selanjutnya.

Perbandingan dari waktu ke waktu

IKU Persentase realisasi pengujian sampel antimicrobial resistance (AMR) pada Triwulan I Tahun 2025 turun sebesar 38.58 % jika dibandingkan dengan IKU capaian sampel tersebut pada Triwulan I Tahun 2024. adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Persentase pengujian AMR

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel Monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji satker BPBL Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan Triwulan I Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2024			
0	0	0.00%	0	-38.58	16	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 15. Perbandingan Persentase pengujian sampel AMR

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase
BPBL Lombok	0	0	0.00
BPBL Ambon	4	9	225.00
BPBL Batam	6	6	100.00
BBPBL Lampung	6	12	200.00

Alokasi Anggaran

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 14.624.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum ada realisasi belanja atau prosentase pencairannya masih 0% dari pagu yang digunakan untuk Perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini terdapat permasalahan yaitu adanya beberapa *reagensia* dan bahan kimia yang sudah dipesan namun masih dalam status *indent* (pemesanan), sehingga tindak lanjut ke depannya adalah akan dipantau terus status ketersediannya dan untuk mengantisipasi kendala serupa, maka ke depan pengadaan akan dilaksanakan lebih awal.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 :

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut

7. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok

Kebun Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025 merupakan bantuan pemerintah berupa barang yaitu sarana dan prasarana KBRL dengan metode :

- 1) Longline;
- 2) Rakit apung; dan
- 3) Lepas dasar.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga tidak ada perbaikan yang perlu dilakukan, dan pada Triwulan ini dilakukan penyusunan target sarana budidaya Rumput Laut pada Tahun 2025.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat ditargetkan pada Triwulan ke-IV dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun, namun demikian sebelumnya perlu dilakukan verifikasi calon penerima terlebih dahulu yang direncanakan akan dilakukan pada Triwulan ke II-III tahun 2025.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Sarana budidaya Rumput Laut pada Triwulan I Tahun 2025 sama dengan Triwulan I Tahun 2024 yaitu belum ada bantuan KBRL yang disalurkan ke masyarakat. Berikut adalah Tabel capaian bantuan bibit Rumput Laut :

Tabel 16. Persentase bantuan sarana KBRL yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 thd Triwulan I Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
0	0	0.00%	0	0	26	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan sarana KBRL BPBL Lombok capaiannya sama dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 17. Perbandingan antar UPT Laut DJPB

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	0	0	0.00

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2025



BPBL Ambon	0	0	0.00
BPBL Batam	0	0	0.00
BBPBL Lampung	0	0	0.00

Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 76.700.000 dimana pada Triwulan ini belum ada realisasi dari pagu anggaran atau sebesar 0% pencairan untuk kegiatan KBRL.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat permasalahan yaitu adanya efisiensi anggaran namun demikian tim kerja kerja bantuan sarana dan prasarana tetap menyiapkan rencana identifikasi dan verifikasi calon penerima KBRL di tahun 2025.

8. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah berupa Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan bibit rumput laut kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Strain :
 - *Kappaphycus alvarezzi* / *Eucheuma cottonii*
 - *Kappaphycus Striatum*/Sakul
 - *Eucheuma Spinosum*
 - *Gracilaria Sp* dan/atau
 - Jenis lainnya sesuai dengan karakteristik perairan.
- Bibit hasil kultur jaringan atau bibit lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan asal atau hasil verifikasi oleh UPT DJPB atau dinas prov/kab/kota;
- Thalus : Bercabang banyak, bersih, tidak berlendir, tidak patah, sehat dan tidak ditempeli lumut dan organisme lainnya

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga tidak ada perbaikan yang perlu dilakukan, dan pada Triwulan ini dilakukan penyusunan target bantuan bibit rumput laut pada Tahun 2025.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Bantuan Bibit Rumput Laut baru akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun, ditargetkan sebanyak 7.129 Kg yang ditargetkan pada triwulan ke-IV tahun 2025. Namun demikian sebelumnya perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Bibit Rumput Laut tahun 2025.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Bibit Rumput Laut pada Triwulan I Tahun 2025 capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di Triwulan I Tahun 2024. IKU Bantuan Bibit Rumput Laut ditargetkan di Triwulan ke-IV Tahun 2025.

Berikut adalah tabel perbandingan IKU Bantuan Bibit Rumput Laut yang dibandingkan dengan Target dan Capaian pada Triwulan I tahun sebelumnya :

Tabel 18. Persentase bantuan bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 thd Triwulan I Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap target Tahunan 2025
Target	Realisasi	Capaian				
0	0	0.00%	20.00%	-100.00%	7,129	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan Bibit Rumput Laut BPBL Lombok capaiannya sama dengan BPBL Lampung namun lebih rendah dari BPBL Ambon, BPBL Batam tidak memiliki Indikator Kinerja Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat. Berikut adalah tabel perbandingannya :

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2025



Tabel 19. Perbandingan antar UPT Laut DJPB

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	0	0	0.00
BPBL Ambon	500	500	100.00
BPBL Batam	-	-	-
BBPBL Lampung	0	0	0.00

Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 499.030.000 namun setelah dilakukan efisiensi, anggarannya tersedia Rp. 120.445.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 19.993.180 atau 16.60% dari pagu untuk biaya operasional produksi.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan I Tahun 2025 permasalahan yang dihadapi adalah masih berjalannya proses penanaman bibit rumput laut sehingga belum ada realisasi bantuan bibit rumput laut.

Tindak lanjut Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah optimalisasi produksi bibit rumput untuk bantuan ke masyarakat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 :

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

9. Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian PM SAKIP yang dilakukan melalui LKE Inspektorat Jenderal dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%),

pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi, namun demikian pada Triwulan I Tahun 2025 ini akan dilakukan perencanaan kinerja untuk Tahun 2025.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan penghitungan nilai PM SAKIP BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan Tahun lalu karena dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

permasalahan pada Triwulan I Tahun 2025 ini adalah adanya perubahan indikator kegiatan sehingga pembentukan tim kerja disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah memperbarui dokumen-dokumen yang diperlukan.

10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur

menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS,
 2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
 3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
 4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.
2. Tidak ada permasalahan pada Tahun 2024 ini, namun meskipun demikian BPBL Lombok pada Tahun 2025 perlu untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi, tindak lanjut pada Triwulan ini adalah dilakukan in house training untuk meningkatkan kompetensi pegawai di BPBL Lombok.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan penghitungan capaian IP ASN, penghitungan akan dilakukan pada semester I Tahun 2025.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan perbandingan dengan tahun lalu karena perbandingan baru dilakukan pada semester I Tahun 2025.

Perbandingan antar sub unit kerja

Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok capaiannya sama dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BBPBL Lampung yaitu belum ada capaian pada Triwulan I Tahun 2025.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2025 ini adalah hanya beberapa pegawai yang melakukan update kompetensi. Tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah mengadakan I house training untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

11. IKU Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok

Unit Kerja yang berpredikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

permasalahan yang terjadi pada Tahun lalu adalah proses pengumpulan dokumen dan data dukung membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlunya konsistensi dari Ketua tim dan anggota untuk tetap melakukan pengumpulan dokumen yang bersifat rutin

Perbaikan yang telah dilakukan adalah melakukan interaksi yang lebih intens melalui rapat-rapat internal yang diagendakan dilakukan secara bulanan sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan Zona Intergritas.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I ini belum dilakukan penghitungan penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan penghitungan karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2025 ini adalah adanya perpindahan anggota tim tahun lalu yang menyebabkan terjadinya perubahan anggota dalam tim ZI WBK.

Tindak lanjut ke depannya adalah koordinasi dengan tim ZI WBK yang baru terkait dengan tanggung jawab tiap area .

12. IKU Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok

Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi

laporan keuangan BPBL Lombok.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Tidak ada Permasalahan pada Tahun 2024 dan Tindak lanjut pada Tahun 2025 adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I ini belum dilakukan penghitungan Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Pada Triwulan I ini belum ada LHP BPK yang harus diselesaikan, meskipun demikian tindak lanjut ke depannya adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Permasalahan pada Tahun 2024 adalah BPBL Lombok mendapat beberapa rekomendasi hasil dari pengawasan inspektorat Jenderal, namun demikian hal tersebut dapat diselesaikan.

Tindak lanjut pada Tahun 2025 adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan surat dari sesditjen perikanan budidaya nomor B.2311/DJPB.1/TU.140/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” Triwulan I Tahun 2025, nilai BPBL Lombok sebesar 92,86% dari target 85%.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

Pada Triwulan I Tahun 2025, Capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok Tahun 2025 turun sebesar 7.14% dari Tahun 2024, namun capaian prosentase tersebut melebihi dari target tahunan 2025 yaitu sebesar 109.25% . Berikut adalah tabel perbandingan IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok :

Tabel 20. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Nama Indikator : Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Triwulan I Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2024			
85	92.86	109.25%	100	-7.14	85	109.25%

Perbandingan antar sub unit kerja

Berikut adalah tabel perbandingan Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB

Tabel 21. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Selditjen Perikanan Budi Daya	88,89%
2	Direktorat Ikan Air Laut	92,86%
3	Direktorat Rumput Laut	89,19%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	92,86%
5	Direktorat Ikan Air Payau	92,86%
6	BBPBAP Jepara	100,00%
7	BBPBL Lampung	92,86%
8	BBPBAT Sukabumi	92,00%
9	BPBAT Ombondjo	100,00%
10	BPBAP Takalar	92,86%
11	BPBAT Sungai Gelam	92,86%
12	BPBAT Mandiangin	92,86%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	92,86%
15	BPBL Ambon	92,86%
16	BPBAP Ujung Batee	92,86%
17	BPBAT Tatelu	96,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	91,67%
20	BPKIL Serang	92,86%

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak ada permasalahan yang terjadi, nilai BPBL Lombok dari 100% menjadi 92,86% karena pada Triwulan IV BPBL Lombok tidak ada rekomendasi dari itjen sehingga nilai IKU mengikuti level I.

Tindak lanjut triwulan berikutnya adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

14. IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)

Nilai IKPA adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 Tidak ada permasalahan yang berarti dimana target dapat terpenuhi, perbaikan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah melakukan koordinasi antara bagian perencanaan, penanggung jawab kegiatan dan PPK untuk menyusun rencana kegiatan dan keuangan Tahun 2025.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan penghitungan karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

permasalahan pada Triwulan I Tahun 2025 ini adalah terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan penyesuaian kegiatan-kegiatan tanpa mengurangi kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

15. IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART DJA.

Pada aplikasi SMART DJA, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Tahun 2024 Tidak ada permasalahan yang berarti dimana target dapat terpenuhi, namun demikian perbaikan pada tahun 2025 ini adalah dilakukan koordinasi antara bagian perencanaan, penanggung jawab kegiatan dan PPK untuk menyusun rencana kegiatan dan keuangan Tahun 2025.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

pengisian SMART hingga saat ini masih terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sehingga dibutuhkan berkoordinasi dengan operator komitmen dalam hal pengisian capaian output aplikasi SAKTI.

16. IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)

IKU indeks Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama

dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Permasalahan pada Tahun 2024 adalah nilai Indeks Pengelolaan Kepegawaian yang tidak mencapai target, perbaikan yang sudah dilakukan adalah konsultasi kepada ditjen Perikanan Budi Daya dimana berdasarkan arahan dari Ditjen PB nilai indeks kepegawaian BPBL Lombok rendah karena usuan kebutuhan kurang memperhatikan peta jabatan dan layanan mutasi kurang memperhatikan angka kredit dan kebaikan jabatan.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Indeks pengelolaan Kepegawaian karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Tidak ada permasalahan yang berarti, meskipun demikian BPBL Lombok tetap menganalisa data kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. IKU Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan *good governance*. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ).

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum ada permasalahan pada Tahun lalu

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Pada Triwulan I ini belum ada permasalahan yang berarti, kegiatan pelayanan publik tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan pelayanan

menganalisa data kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. IKU Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok (%)

IKU Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Tidak ada permasalahan yang berarti pada Tahun 2024, namun demikian BPBL Lombok tetap melaksanakan layanan perkantoran secara efektif.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan perhitungan prosentase layanan perkantoran karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Permasalahan pada Triwulan I tahun 2025 adalah adanya kerusakan di beberapa titik di gedung Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, kantor utama dan pantry.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dilakukan perbaikan di titik-titik tersebut dalam rangka pelayanan kantor BPBL Lombok.

19. IKU Nilai Pengawasan kearsipan internal satker BPBL Lombok (Nilai)

Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Permasalahan pada Tahun 2024 adalah nilai pengawasan arsip yang belum mencapai target.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah mengusulkan CPNS di bidang kearsipan supaya nilai kearsipan bisa mencapai target.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan penilaian pengawasan kearsipan karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

Permasalahan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah belum adanya pegawai yang memiliki keahlian di bidang kearsipan, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah tetap mengelola kegiatan kearsipan yang dilaksanakan oleh pegawai lain.

6. IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok (persen)

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum ada permasalahan pada Tahun 2025

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini belum dilakukan perhitungan prosentase layanan perkantoran karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dengan Target Tahunan dan Target Tahun Lalu

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Alokasi anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan berikutnya

permasalahan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah akan adanya kerusakan di beberapa titik gedung Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dilakukan perbaikan di titik-titik tersebut dalam rangka pelayanan kantor BPBL Lombok.

a. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya laut mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 18.397.276 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan dari dana yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 3.049.669.416 atau 16,58% dari pagu.

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER:

PERIODE | JANUARI S.D. MARET

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	567762 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	PAGU	8,006,397,000	10,325,879,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	18,397,276,000
		REALISASI	2,088,656,668 (26.09%)	961,012,748 (9.31%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,049,669,416 (16.58%)
GRAND TOTAL		PAGU	8,006,397,000	10,325,879,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	18,397,276,000
		REALISASI	2,088,656,668 (26.09%)	961,012,748 (9.31%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,049,669,416 (16.58%)
		SISA	5,917,740,332	9,364,866,252	65,000,000	0	0	0	0	0	0	15,347,606,584

Gambar 10. Screenshot aplikasi OMSPAN

b. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Pada Triwulan I Tahun 2025 nilai efisiensi BPBL Lombok adalah 15%.



Gambar 11. Screenshot aplikasi SMART DJA

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Pada Triwulan I Tahun 2024 hasil pengukuran dan analisa yang dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada seluruh indikator-indikator utama (IKU) yang menjadi target BPBL Lombok didapatkan hasil dari total 20 IKU, sebanyak 2 indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam mempercepat dan meningkatkan kinerja BPBL Lombok di tahun-tahun kedepan beberapa upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan, antara lain: (i) melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja, PPK, pejabat keuangan dan pejabat berwenang lainnya untuk melakukan realisasi kegiatan dengan memperhatikan efisiensi; (ii) mengajukan kebutuhan akan jabatan arsiparis di BPBL Lombok .

Akhirnya, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian-capaian output dari IKU yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala BPBL Lombok. Lebih lanjut lagi, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan/ input dalam merumuskan kebijakan baik di level UPT maupun di tingkatan yang lebih tinggi (level pusat) di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (unit)	12
SK 2	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ekor)	269.531
		3	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok (ekor)	948
		4	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok (Orang)	300
		5	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374
		6	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16
SK 3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (Unit)	26
		8	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	7129
SK 4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	9	Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	85
		10	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	81
		11	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71,5
		16	Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3
		17	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	≥80
		18	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok	80
		19	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70
		20	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok (persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

Data Anggaran

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	1.929.030.000
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	2.332.340.000
3	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.580.000.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.555.906.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025		18.397.276.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

LAMPIRAN 2

DATA DUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Realisasi Bantuan Benih
Tahun 2025**

Komoditas	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	Nomor BAST	Tanggal BAST	SK Penerima	Tanggal Distribusi	Jumlah
									51,000.00
Kakap Putih	Muara Biru	Abdul Rauf	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	B.137/BPBL-L/PB.140/I/2025	17 Januari 2025	B.104/BPBL-L/KP.140/I/2025	17 Januari 2025	11,000.00
Tiram Mutiara	Mutiara Teluk Saleh	Ahmad	Dompu	Nusa Tenggara Barat	B.392/BPBL-L/PB.140/II/2025	24 Februari 2025	B.364/BPBL-L/KP.140/II/2025	24 Februari 2025	20,000.00
Tiram Mutiara	Lumba-Lumba	Esmandoro	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	B.393/BPBL-L/PB.140/II/2025	24 Februari 2025	B.364/BPBL-L/KP.140/II/2025	24 Februari 2025	10,000.00
Tiram Mutiara	Suka Maju	Karimuddin	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	B.394/BPBL-L/PB.140/II/2025	24 Februari 2025	B.364/BPBL-L/KP.140/II/2025	24 Februari 2025	10,000.00



Lombok Barat, 11 April 2025

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi.

Realisasi Sampel Lab Keskanling Tahun 2024
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

CAPAIAN SAMPEL LAB KESKANLING BPBL LOMBOK

No	Bulan	Ruang Lingkup				Jumlah	Kumulatif
		Kualitas Air	Patologi	Mikrobiologi	Biologi Molekuler		
1	Januari	285	8	1	17	311	311
2	Februari	220	0	35	37	292	603
3	Maret	98	18	14	42	172	775
4	April					0	
5	Mei					0	
6	Juni					0	
7	Juli					0	
8	Agustus					0	
9	September					0	
10	Oktober					0	
11	November					0	
12	Desember					0	



Lombok Barat, 11 April 2025

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.2311/DJPB.1/TU.140/IV/2025 11 April 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB"
Triwulan I Tahun 2025

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I Tahun 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2025 lingkup DJPB sebesar 92,86% (tuntas 195 dari 210 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran II.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran I Surat Dinas
Nomor : B.2311/DJPB.1/TU.140/IV/2025
Tanggal : 11 April 2025

Daftar Penerima Surat

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
2. Direktur Ikan Air Tawar
3. Direktur Ikan Air Payau
4. Direktur Ikan Air Laut
5. Direktur Rumput Laut
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
7. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
8. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi
12. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiingin
13. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
17. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
18. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
19. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
20. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : B.2311/DJPB.1/TU.140/IV/2025
Tanggal : 11 April 2025

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	88,89%
2	Direktorat Ikan Air Laut	92,86%
3	Direktorat Rumput Laut	89,19%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	92,86%
5	Direktorat Ikan Air Payau	92,86%
6	BBPBAP Jepara	100,00%
7	BBPBL Lampung	92,86%
8	BBPBAT Sukabumi	92,00%
9	BPBAP Situbondo	100,00%
10	BPBAP Takalar	92,86%
11	BPBAT Sungai Gelam	92,86%
12	BPBAT Mandiingin	92,86%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	92,86%
15	BPBL Ambon	92,86%
16	BPBAP Ujung Batee	92,86%
17	BPBAT Tatelu	96,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	91,67%
20	BPKIL Serang	92,86%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan